

IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL BERBASIS MODERN TELUK KUANTAN

SKRIPSI

*Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh :

FITRI NURHIDAYANTI
NPM.210411026

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL :IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL BERBASIS MODERN TELUK KUANTAN

NAMA : FITRI NURHIDAYANTI

NPM : 210411026

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

EMILIA EMHARIS,S.Sos.,M.Si
NIDN.1002059002

ALSAR ANDRI,S.Sos.,M.Si
NIDN.1005108901

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

EMILIA EMHARIS,S.Sos.,M.Si
NIDN.1002059002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRI NURHIDAYANTI

Npm : 210411026

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di perguruan tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain. Telah saya tulis orang lain, telah saya tulis sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan tidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 12 Maret 2025



PENGESAHAN

Diperiksa Dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15

Bulan : Mei

Tahun : 2025

Tim Pengaji

Ketua,

Rika Ramadhanti,S.IP.,M.Si

NIDN: 1030058402

Sekretaris,

Alsar Andri,S.Sos.,M.Si

NIDN: 1005108901

Mengetahui

Fakultas Ilmu

Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,

Rika Ramadhanti,S.IP.,M.Si

NIDN: 1030058402

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”.

(Q.S Al-Insyirah:5)

“It's Fine To Fake It Until You Make It, Until You Do, Until It's True”.

(Snow On The Beach-Taylor Swift)

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaikku Ayahanda **Sulaiman**. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban berkeringat, tenaga, dan fikiran. Beliau memang tidak dapat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda **Dina Kurniasih**. Meskipun tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan namun Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi penulis, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Dosen pembimbing I dan II yaitu Bapak Emilia Emharis S.Sos.,M.Si dan Bapak Alsar Andri S.Sos.,M.Si. Terimakasih telah memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Adik tercinta **Bayu Angga Jati** dan **Muhammad Fharid**. Terimakasih atas dukungan serta memberikan do'a dan kasih sayang yang luar biasa.
5. **Fitri Nurhidayanti (Penulis)**. Terimakasih banyak sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Tugas Akhir meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini.

Teluk Kuantan, Maret 2025

Penulis,

FITRI NURHIDAYANTI
NPM.210411026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL BERBASIS MODERN TELUK KUANTAN”** ini dengan baik. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyusun penelitian akademik pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa sejak awal selesainya penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi;
2. Ibu Rika Ramadhanti S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi;
3. Bapak Emilia Emharis S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara; dan selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan skripsi ini.

4. Bapak Alsar Andri S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti.
6. Semua pihak rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu. Terimakasih atas semangat dan kerjasamanya.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, saya harapkan Skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis.

Teluk Kuantan, Maret 2025
Penulis

Fitri Nurhidayanti
NPM. 210411026

IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL BERBASIS MODERN TELUK KUANTAN

Oleh :

**Fitri Nurhidayanti
Npm. 210411026**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan. Fokus penelitian adalah proses pelaksanaan kebijakan relokasi PKL oleh pemerintah daerah, mencakup faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum terimplementasi

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Relokasi.

**THE IMPLEMENTATION OF VENDOR ARRANGEMENT AT
THE MODERN-BASED TRADITIONAL MARKET IN TELUK
KUANTAN**

by:

**Fitri Nurhidayanti
Npm.210411026**

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 24 of 2019 concerning Guidelines for the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the Modern-Based Traditional Market of Kuantan Bay. The focus of the research is the process of implementing street vendor relocation policies by local governments, including factors that affect success such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is qualitative descriptive with a field study approach through observation, interviews, and documentation. The research findings show that the implementation of the policy has not been implemented yet.

Keywords: Implementation, Policy, Street Vendors, Relocation.

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Manfaat Teoritis	3
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	5
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan.....	8
2.1.3Teori/Konsep Implementasi Kebijakan	11
2.1.4 Teori/Konsep Relokasi	18
2.1.5 Teori/Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)	20
2.1.6 Teori/Konsep Pasar Tradisional Berbasis Modern	20
2.2 Kerangka Pemikiran	24
2.3 Hipotesis Kerja.....	27
2.4 Definisi Operasional.....	27
2.4.1 Komunikasi.....	27
2.4.2 Sumber Daya	28
2.4.3 Disposisi	28

2.4.4 Struktur Birokrasi	28
2.5 Operasional Variabel	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Informan	30
3.3 Sumber Data	32
3.3.1 Data primer.....	32
3.3.2 Data sekunder.....	33
3.4 Fokus Penelitian	33
3.5 Lokasi Penelitian	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6.1 Observasi.....	33
3.6.2 Wawancara	34
3.6.3 Dokumentasi.....	34
3.6.4 <i>Triangulasi</i>	34
3.7 Metode Analisis Data	34
3.7.1 Pengumpulan Data	35
3.7.2 Reduksi Data	35
3.7.3 Penyajian Data.....	36
3.7.4 Pengambilan Keputusan atau Verifikasi.....	36
3.8 Jadwal Penelitian.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	38
4.2 Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.....	39
4.3 Kondisi Geografis dan Karakteristik Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
4.4 Kondisi Demografi Kabupaten Kuantan Singingi	42
4.4.1 Kependudukan	42
4.4.2 Mata Pencaharian.....	43
4.5 Sejarah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Perdagangan	44
4.6 Visi Dan Misi.....	45
4.6.1 Visi	45

4.6.2 Misi	45
4.6.3 Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	46
4.6.4 Perdagangan.....	46
4.6.5 Perindustrian	47
4.7 Tugas dan Fungsi.....	47
4.7.1 Kepala Dinas.....	47
4.7.2 Bagian Sekretariat.....	48
4.7.3 Bidang Perdagangan	50
4.8 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaa Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.....	52
4.8.1 Tugas.....	52
4.8.2 Fungsi.....	52
4.9 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singgingi	53
4.10 Data Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian.....	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
5.1 Identitas Responden	56
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	56
5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia	57
5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
5.1.4 Informan Menurut Status Pekerjaan	58
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan	59
5.2.1 Indikator Komunikasi	59
5.2.2 Indikator Sumber Daya	64
5.2.3 Indikator Disposisi.....	69
5.2.4 Indikator Struktur Birokrasi.....	71
5.3 Analisa Hasil pembahasan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan.....	74
5.3.1 Indikator Komunikasi	75
5.3.2 Indikator Sumber Daya	75

5.3.3 Indikator Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan).....	76
5.3.4 Indikator Struktur Birokrasi	77
BAB VI PENUTUP	79
6.1 Kesimpulan.....	79
6.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan.....	23
Tabel II. 2 : Operasional Variabel penelitian Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan	26
Tabel III. 1 : Informan Penelitian Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan	28
Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Tentang Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan	34
Tabel IV. 1 : Nama-nama Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dan Periode Menjabat.....	36
Gambar IV.1 : Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi.....	37
Tabel IV. 2 : Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
Tabel IV. 3 : Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Dan Perempuan.....	40
Tabel V.I : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel V.2 : Klasifikasi Informan Berdasarkan Tingkat Usia.....	54
Tabel V.3 : Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	55

Tabel V.4 : Karakteristik Informan Menurut Status Pekerjaan.....56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di pasar tradisional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib. Keberadaan PKL memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau. Namun, tanpa penataan yang baik, keberadaan mereka dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, ketidakteraturan tata kota, dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dalam menata dan memberdayakan PKL agar mereka dapat beroperasi secara lebih teratur dan berkelanjutan. Landasan hukum utama dalam pengelolaan PKL adalah Peraturan Bupati Kuantan Singgingi Nomor 24 Tahun 2019 secara khusus mengatur tentang penataan pedagang di lahan pasar Teluk Kuantan. Pasal 3 dan pasal 4 dalam regulasi ini menyatakan mengatur lokasi dan tata letak pedagang di lahan pasar serta pemindahan pedagang untuk mendukung ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di Teluk Kuantan.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang sering dihadapi meliputi:

1. Kurangnya sosialisasi kepada PKL mengenai kebijakan relokasi.

2. Ketidakpuasan pedagang terhadap lokasi baru karena dianggap kurang strategis.
3. Minimnya dukungan infrastruktur di lokasi relokasi, seperti akses transportasi, fasilitas sanitasi, serta sarana pendukung usaha lainnya.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, upaya relokasi PKL dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota agar lebih tertib dan nyaman. PKL yang masih berjualan di trotoar dan bahu jalan menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih besar. Aktivitas mereka kerap mengganggu ketertiban umum, menyebabkan kemacetan, dan menurunkan kualitas kebersihan lingkungan. Namun, di sisi lain, sektor informal ini juga menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah, di antaranya:

1. Pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengganggu mobilitas masyarakat.
2. Ketidakteraturan tata ruang kota, yang dapat menghambat pengembangan infrastruktur perkotaan.
3. Dampak lingkungan, seperti meningkatnya sampah dan pencemaran akibat kurangnya fasilitas kebersihan di area PKL.
4. Kerawanan sosial, termasuk potensi meningkatnya tindakan kriminal akibat lingkungan yang tidak teratur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 3 dan 4 pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat

usaha yang aman, tertib, dan layak bagi PKL. Hal ini mencakup penyediaan lokasi yang strategis, fasilitas pendukung seperti sanitasi dan akses transportasi yang baik, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha.

Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa lokasi relokasi dapat benar-benar memberikan keuntungan bagi para pedagang, sekaligus menciptakan keteraturan dalam tata ruang kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019 di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini bisa menjadi bahan pembelajaran, pemahaman dan pengalaman terhadap pengetahuan yang selama ini di pelajari dan didapat dalam penelitian khususnya dalam ilmu administrasi negara.

1.4.1.2 Penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu perekonomian pada ilmu administrasi negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Harapan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi kepada pemerintah daerah dalam relokasi pedangan kaki lima ini bisa mensejahterakan masyarakat.

1.4.2.2 Memberikan pemahaman untuk kepada dunia usaha dalam pentingnya kebijakan pemerintah setempat dalam merelokasi pedagang kaki lima tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Nawawi (2013:79) administrasi negara adalah administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya yang terus bergerak dan terkait dengan konteks sosial dan lingkungan yang ada disekitarnya.

Menurut Siagian (dalam Rahman, 2017:8) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Syafiie (2016:13) administrasi merupakan suatu fenomenal sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada Administrasi itu berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat didalam suatu organisasi. Jadi barang siapa yang ingin mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Menurut Amin (dalam Makmur, 2017:62) administrasi meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tatalaksananya. Selanjutnya administrasi negara adalah

proses pemikiran dan tindakan oleh aparatur negara untuk menciptakan instrumen pengaturan kemudian dilaksanakan untuk melahirkan ketentuan melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Nawawi, 2013:80) administrasi negara merupakan yang meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan. Berdasarkan argumentasi diatas untuk mencapai tujuan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara yang bersangkutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya keberhasilan tujuan sebuah negara.

Menurut Waldo (dalam Listyaningsih, 2014:2) administrasi negara mengandung dua pengertian yaitu:

1. Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah dan,
2. Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Menurut Nigro (dalam Desriadi, 2018:64) administrasi negara adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif , mempunyai suatu peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.

Selanjutnya kriteria pokok Administrasi Negara yaitu : *Pertama*, rasionalitas. Artinya setiap pelaksanaan administrasi negara dapat diterima akal sehat yang bersifat universal. Administrasi negara mengedepankan rasionalitas dalam setiap

pelaksanaannya. *Kedua*, Efektifitas. Artinya setiap pelaksanaan administrasi negara dapat tercapai sesuai dengan rencana dan lebih berdayaguna. Administrasi Negara mengedepankan asas efektifitas agar setiap kegiatannya mengacu pada tujuan negara. *Ketiga*, Efisiensi. Artinya setiap pelaksanaan administrasi negara dilakukan dengan perbandingan antara hasil dan pengorbanan. Administrasi Negara dirancang sedemikian rupa dalam bentuk perencanaan untuk pencapaian tujuan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Menurut Makmur (2017:108) penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan negara yang terhimpun dalam administrasi negara adalah adanya keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan, dimana kegiatan kekuasaan lebih mengarah kepada ketataan, kemauan, keseriusan dan semacamnya dengan menggunakan kata harus untuk melaksanakan berbagai kegiatan, sedangkan kewenangan menentukan batas yang dapat dikerjakan dengan yang tidak boleh dikerjakan seseorang atau beberapa orang baik aparatur negara maupun anggota masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya menurut Ermaya Suradinata (dalam Zaidan Nawawi, 2013:80) Administrasi Negara atau Public Administration itu mencakup segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara dari tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi dalam suatu negara.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli di atas administrasi adalah suatu disiplin ilmu dan praktik manajerial yang terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, materiil, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi atau sistem. Dalam ruang lingkup

ini, administrasi tidak hanya mengacu pada kegiatan manajemen internal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, termasuk interaksi sosial, budaya organisasi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Sebagai suatu konsep yang sangat luas, administrasi mencakup pengelolaan efisien dan efektif semua aspek organisasi, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan organisasional.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Menurut Friedrich (dalam Hamdi, 2015:36) kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.

Menurut Dye (dalam Widodo, 2021:12) kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Jones (dalam Salampessy dkk, 2023:2-3) istilah kebijakan publik digunakan dalam praktik sehari-hari, tetapi merujuk pada tindakan atau keputusan yang sangat berbeda.

Kebijakan publik adalah seperangkat aturan, program atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Menurut Anderson (dalam Muaidi dan Sofwani, 2016:197) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan seseorang pelaku atau sekelompok

pelaku guna memecah masalah tertentu. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan.

Kebijakan publik adalah pilihan yang membatasi individu pada tingkat kunci atau tata letak yang dibuat oleh pemegang kekuasaan publik. Sebagai pilihan yang mempersempit masyarakat pada umumnya, kebijakan publik harus dibuat oleh para ahli politik, khususnya individu yang mendapat perintah dari masyarakat pada umumnya atau individu, pada umumnya melalui siklus pemilu hingga tindak lanjut bagi individu. Selain itu, strategi publik akan dijalankan oleh organisasi negara yang dikendalikan oleh administrasi otoritas publik. (Rodiyah dkk, 2022:1).

Tujuan dari kebijakan publik adalah keseluruhan kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai hasil tertentu yang diantisipasi oleh masyarakat umum sebagai konstituen perintah. Kebijakan publik adalah keputusan kegiatan yang sah dan nyata karena kebijakan publik dibuat oleh organisasi yang memiliki keaslian dalam kerangka otoritas publik.

Menurut Dunn (dalam Sore dan Sabirin, 2017:24) adapun tahapan kebijakan publik sebagai berikut :

1. Agenda *Setting*/Penyusunan Agenda: Identifikasi masalah yang membutuhkan perhatian kebijakan.
2. *Policy Formulation*/Formulasi Kebijakan: Pengembangan alternatif kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah.
3. *Policy Adoption*/Adopsi/Legitimasi Kebijakan: pemilihan alternatif kebijakan terbaik melalui proses persetujuan.

4. *Policy Implementation/Pelaksanaan* kebijakan dengan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.
5. *Policy Assessment/Evaluation/Evaluasi Kebijakan*: Penilaian efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2023:55) analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik mungkin dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti dalam undang-undang, kebijakan publik, sistem presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*Public Policy*), tergantung bagaimana kita memandangnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang

pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan publik membutuhkan proses analisis mendalam, melibatkan pemahaman terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pemakaiannya, kebijakan publik dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Kesimpulannya, kebijakan publik bukan hanya sebagai pernyataan niat atau panduan, melainkan juga merupakan instrumen aktif yang berperan dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan suatu negara.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Warwic (dalam Arifin Tahir, 2015 : 93) mengatakan bahwa : dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Kemampuan Organisasi
2. Informasi
3. Dukungan, dan Pembagian potensi

Selanjutnya keempat masing-masing faktor di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Kemampuan organisasi, implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:
 - a. Kemampuan teknis.
 - b. Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar unsur terkait.

- c. Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOP” (*Standar Operating Procedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Informasi, faktor informasi sangat pula memegang peran penting. Karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.
3. Dukungan, kurang kesediaan obyek-obyek kebijakan “terkait” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
4. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Pressman dan Wildavsky menyebutkan implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga di maksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa: “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: ”membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. (dalam Apriandi, 2017:13).

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

“Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. (Rizkianty et al., 2021)

Sedangkan menurut Guntur Setiawan (dalam Ferdinandus 2023:14) beliau berpendapat bahwa : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu. (Mulyadi, 2015:12).

Menurut G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumber Daya Organisasi Bagi Keberhasilan Program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (non *human resources*)

4. Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Dari pengertian implementasi menurut pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kesuksesan implementasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Koordinasi efektif antara berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memainkan peran utama dalam menentukan hasil yang optimal. Dukungan dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan menjadi elemen penting, sementara adaptabilitas terhadap perubahan kondisi lingkungan juga merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan.

Selain itu, penerapan kebijakan atau proyek yang berhasil memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, budaya, dan konteks lokal. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif, manajemen konflik yang bijaksana, dan komitmen yang tinggi dari semua pihak terlibat menjadi faktor penentu. Kesimpulannya, implementasi yang berhasil adalah hasil dari sinergi antara strategi yang matang, kolaborasi yang efisien, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika yang mungkin terjadi selama proses implementasi.

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk menyelesaikan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Implementasi dapat dipahami sebagai proses yang mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kemajuan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (Usman dkk, 2024:108).

Jadi implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan pengguna sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, aktor implementasi mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Aktor ini dapat berasal dari sektor pemerintah, masyarakat sipil, atau sektor swasta, tergantung pada sifat kebijakan yang diterapkan. Pada tingkat pemerintahan, aktor

implementasi melibatkan birokrasi, lembaga-lembaga terkait, dan petugas lapangan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menjalankan program-program atau kebijakan tersebut. Di sisi lain, partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta menjadi krusial dalam mendukung efektivitas implementasi, terutama dalam hal menyediakan sumber daya, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.

Aktor implementasi juga dapat melibatkan individu atau kelompok masyarakat yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan, dan partisipasi mereka dalam proses implementasi sering kali menjadi faktor kunci dalam mencapai hasil yang berhasil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran dan dinamika kerja aktor implementasi menjadi esensial dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif dan memberikan dampak positif yang diinginkan dalam masyarakat.

Aktor implementasi merujuk pada entitas atau individu yang terlibat dalam menjalankan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Aktor ini dapat mencakup berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), perusahaan swasta, serta individu dan kelompok masyarakat yang terpengaruh langsung oleh kebijakan tersebut. Peran aktor implementasi sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Mereka bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan, mengalokasikan sumber daya, dan menjalankan program-program yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Selain itu, interaksi dan kolaborasi antara berbagai aktor implementasi, termasuk koordinasi dengan pihak-pihak

eksternal, seperti lembaga pendanaan atau lembaga internasional, dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang peran, motivasi, dan dinamika kerja aktor implementasi menjadi kunci dalam mewujudkan efektivitas kebijakan publik.

Selanjutnya, penting untuk mencermati dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja aktor implementasi. Faktor-faktor ini melibatkan aspek organisasional, individu, dan lingkungan yang dapat memengaruhi kemampuan aktor dalam melaksanakan kebijakan. Pertama, kapasitas organisasional seperti sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur sangat mempengaruhi efektivitas implementasi. Kedua, motivasi dan keterlibatan individu dalam organisasi memiliki dampak besar terhadap bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kondisi lingkungan eksternal, termasuk perubahan sosial, politik, dan ekonomi, juga dapat mempengaruhi proses implementasi.

Proses implementasi kebijakan juga sering kali melibatkan dinamika negosiasi dan koordinasi antara berbagai aktor, yang dapat memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Kesuksesan implementasi sangat tergantung pada kemampuan para aktor untuk bekerja sama, mengatasi perbedaan, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diakomodasi dalam berbagai konteks.

Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, penting untuk mendukung aktor implementasi dengan mekanisme dukungan seperti pelatihan, pengembangan kapasitas, dan insentif yang sesuai. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam

tentang peran dan tantangan aktor implementasi dapat membantu merancang strategi implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2.1.4 Teori/Konsep Relokasi

Relokasi merujuk pada proses pemindahan individu atau kelompok dari satu lokasi ke lokasi lain, yang sering kali berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur penggunaan lahan. Relokasi sementara pedagang eceran bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dan mengubah pola interaksi sosial antara pedagang dan konsumen" (Samahita, 2024: 960). Selain itu, relokasi juga melibatkan aspek negosiasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menghindari konflik dan memastikan keberhasilan proses tersebut.

Sedangkan menurut Binsar M. Gulton (dalam Lailatus, 2022:94) mengungkapkan bahwa secara umum tak jarang relokasi dimaknai sebagai pemindahan lokasi berdasarkan segi ruang geografis. Meski begitu, relokasi mencakup permasalahan antar beragam konsep ruang misalnya ruang sosial, ekonomi, politik, budaya, sampai ke ruang lingkungan hayati. Setiap lokasi memiliki peluang dan batas masing-masing. Dalam memilih lokasi akan lebih memungkinkan bila relokasi dan pemulihannya berhasil karena lokasi yang dipilih sama baiknya dengan tempat terdahulu dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Secara etimologis relokasi berasal dari kata bahasa asing “*relocation*” (menempatkan kembali). Relocation mempunyai sinonim dengan kata “*sittuation*”

(situasi, keadaan). Jadi secara harfiah istilah relokasi mempunyai arti menempatkan kembali sesuatu kedalam situasi tertentu.

Relokasi merupakan salah satu kegiatan dalam kebijakan pemerintah yang mencakup bidang perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial, dll. Sehingga pemerintah memiliki hak melakukan relokasi pada sektor-sektor yang dikuasai pemerintah daerah termasuk fasilitas umum seperti pasar. Secara singkat relokasi dapat diartikan sebagai perpindahan tempat dari lokasi lama ke lokasi baru yang lebih nyaman dan strategis. (Istiqomah, 2023:45)

Relokasi merupakan suatu konsep yang melibatkan perpindahan suatu entitas dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk perusahaan, individu, atau bahkan komunitas. Dalam konteks bisnis, relokasi perusahaan dapat menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, atau mengakses sumber daya yang lebih baik. Proses relokasi perusahaan dapat melibatkan pemindahan kantor pusat, pabrik, atau gudang, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas terhadap pasar atau memanfaatkan faktor lingkungan yang lebih kondusif.

Di sisi lain, relokasi juga dapat menjadi solusi untuk permasalahan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, relokasi mungkin terkait dengan pemindahan komunitas yang terpengaruh oleh bencana alam atau perubahan iklim. Pemerintah dan organisasi non-profit sering kali terlibat dalam upaya relokasi untuk melindungi masyarakat dari risiko yang dapat membahayakan nyawa atau keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, konsep relokasi dapat diaplikasikan secara luas, baik

dalam rangka pengembangan bisnis maupun untuk menjawab tantangan sosial dan lingkungan.

2.1.5 Teori/Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah individu atau kelompok yang menjalankan usaha kecil di sektor informal dengan modal relatif kecil, menjual barang atau jasa di tempat strategis seperti trotoar, bahu jalan, atau area publik lainnya tanpa izin formal. Kegiatan mereka umumnya tidak terorganisir, tidak tetap, dan sering dianggap mengganggu tata ruang kota. PKL juga biasanya merupakan usaha mandiri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, terutama di tengah keterbatasan lapangan kerja di sektor formal (Arlinda & Dyah, 2017:2)

PKL sering kali diidentifikasi dengan ciri-ciri seperti modal usaha yang kecil, lokasi berjualan yang tidak menetap, dan pola kerja yang fleksibel namun tidak teratur. Keberadaan mereka memainkan peran penting dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa pencemaran lingkungan, ketidakteraturan tata ruang, dan konflik penggunaan ruang publik (Hasanuddin, 2019:62).

2.1.6 Teori/Konsep Pasar Tradisional Berbasis Modern

Pasar tradisional berbasis modern adalah pasar yang tetap mempertahankan ciri khas tradisional seperti transaksi tawar-menawar dan keanekaragaman produk lokal, namun dilengkapi dengan fasilitas modern seperti infrastruktur yang lebih baik, kebersihan yang terjaga, dan pengelolaan yang profesional untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli (Hasanuddin, 2019:63). Pasar ini menjadi alternatif yang diharapkan dapat

mengintegrasikan kebutuhan masyarakat akan pasar tradisional dengan standar pengelolaan yang lebih baik, sehingga mampu bersaing dengan pasar modern.

Penerapan konsep pasar tradisional berbasis modern biasanya melibatkan perbaikan pada fasilitas fisik seperti kios yang lebih rapi, area parkir yang memadai, fasilitas kebersihan seperti tempat sampah, serta ruang yang lebih tertata untuk menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Selain itu, pasar ini juga mengintegrasikan aspek pengelolaan berbasis teknologi untuk mempermudah manajemen pasar dan transparansi antara pihak pengelola dan pedagang (Afiati, 2020:45).

Dalam konteks ini, pasar tradisional berbasis modern tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Konsep ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah yang sering dihadapi pasar tradisional, seperti ketidakteraturan, kebersihan yang kurang terjaga, dan menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional (Hasanuddin, 2019:65).

Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan merupakan salah satu proyek revitalisasi pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, kebersihan, dan keteraturan aktivitas perdagangan di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pasar ini dibangun di atas lahan seluas 8,6 hektare dan memiliki kapasitas untuk menampung lebih dari 500 pedagang. Sebagian besar pedagang yang menempati pasar ini sebelumnya berjualan di

sepanjang jalan sekitar Pasar Rakyat, dan telah direlokasi untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.

Kemudian terkait biaya atau harga sewa lapak di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang penataan dan penempatan hak sewa kios dan pelataran pedagang Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Pasar ini memiliki sekitar 427 kios dengan nilai sewa tahunan per kios sekitar Rp.1.200.000, yang dibayar setiap enam bulan Rp.600.000.

Namun, meskipun telah dilakukan upaya penataan, pasar ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah kondisi infrastruktur di sekitar pasar, khususnya jalan akses masuk dan keluar yang rusak parah, menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengunjung dan pedagang. Selain itu, penataan lahan parkir yang kurang rapi sering menyebabkan kemacetan di sekitar pasar, terutama saat aktivitas bongkar muat barang dagangan.

Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dan menjadikan Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan sebagai percontohan pasar tradisional yang tertata dan modern di Provinsi Riau. Langkah-langkah seperti penertiban pedagang, pemantauan harga bahan pokok, dan perbaikan fasilitas pasar terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang didukung dengan dokumentasi visual, kondisi Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan hingga saat ini

masih menghadapi berbagai permasalahan yang bertentangan dengan prinsip dasar dari pasar modern, yaitu ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan.

Secara fisik, pasar ini telah memiliki bangunan semi permanen yang dirancang untuk mendukung aktivitas jual beli dengan fasilitas yang lebih baik dibandingkan pasar tradisional konvensional. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak pedagang yang masih memilih berjualan di area luar bangunan utama, seperti di bahu jalan atau lahan terbuka dengan menggunakan tenda darurat. Hal ini menyebabkan tatanan pasar tampak tidak teratur dan cenderung semrawut. Penempatan pedagang yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga mengganggu arus lalu lintas dalam pasar dan mengurangi kenyamanan pengunjung.

Di sisi lain, aspek kebersihan pasar juga menjadi persoalan yang cukup mencolok. Terlihat banyaknya sampah yang berserakan di sekitar area pasar, terutama di dekat lapak pedagang dan sepanjang jalan pasar. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya sistem pengelolaan sampah serta kurangnya kesadaran pedagang dan pengunjung akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Minimnya fasilitas kebersihan, seperti tempat sampah yang memadai dan petugas kebersihan yang aktif, turut memperparah situasi tersebut. Jika tidak segera ditangani, keberadaan sampah ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Meskipun infrastruktur pasar telah tersedia, namun pemanfaatannya belum optimal. Beberapa bagian dari bangunan pasar tampak kosong atau tidak digunakan oleh pedagang. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat kelemahan dalam hal

pengelolaan, sosialisasi, dan penegakan aturan oleh pihak terkait. Selain itu, ketiadaan rambu atau petunjuk arah serta penataan area parkir yang belum tertib juga menambah kesan bahwa pasar ini belum sepenuhnya memenuhi standar pasar modern.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konsep “pasar tradisional berbasis modern” di Pasar Teluk Kuantan masih belum terlaksana secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan pengelola pasar, antara lain:

1. Menata ulang posisi dan zonasi pedagang agar sesuai dengan rencana tata ruang pasar.
2. Menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pedagang.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan bangunan pasar melalui pendekatan persuasif dan edukatif.
4. Menata sistem lalu lintas dan area parkir di dalam pasar agar tercipta kenyamanan dan keteraturan.

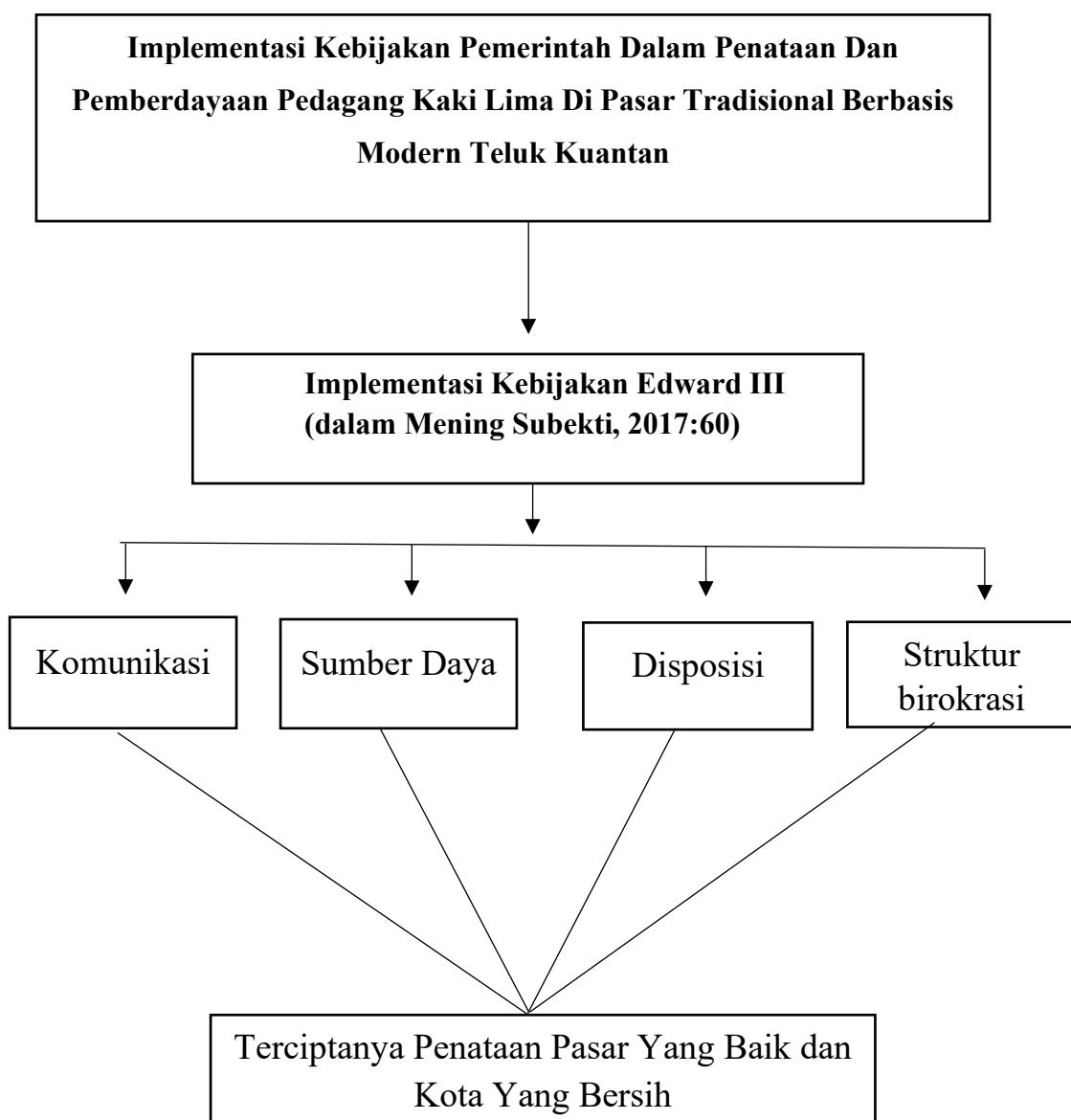
2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya.

Penelitian ini menggunakan model implementasi dari teori George C. Edward III. Edwards III menilai implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi

implementasi kebijakan. Menurut Edwards (dalam Mening Subekti, 2017:60), ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: komunikasi (communication), sumber daya manusia (resource), sikap (disposition), dan struktur birokrasi (beureucratic structure). Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut :

Tabel II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan



Sumber: modifikasi peneliti tahun 2025

2.3 Hipotesis Kerja

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut: diduga sementara Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar tradisional berbasis modern Teluk Kuantan belum dikelola dengan baik, karena masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar.

2.4 Definisi Operasional

Konsep operasional adalah konsep secara jelas mengenai variabel-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat (Purwanto, 2007:93). Konsep operasional juga menjelaskan tentang bagaimana kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh indikator yang dimaksud (Masyuri dan Zainuddin, 2008:131).

Definisi operasional adalah konsep yang merinci dan mengkaji secara rinci elemen-elemen kritis dari suatu variabel atau konsep dalam sebuah penelitian atau program. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang bagaimana suatu variabel atau konsep akan diukur atau diamati. Dalam konteks penelitian, definisi operasional membantu peneliti untuk mengukur variabel-variabel tertentu dengan cara yang obyektif dan dapat diulang.

2.4.1 Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan

tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (Subarsono, 2020:90).

2.4.2 Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif . tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. (Subarsono, 2020:91).

2.4.3 Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif. (Subarsono, 2020:91).

2.4.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Subarsono, 2020:92).

2.5 Operasional Variabel

Tabel II. 2 : Operasional Variabel penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Implementasi	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Transmisi	Ordinal
			b. Kejelasan	
			c. Tujuan	
		2. Sumber Daya	a. SDM	Ordinal
			b. Finansial	
		3. Disposisi	Sikap	Ordinal
		4. Struktur Birokrasi	Pragmentasi	Ordinal

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif.

Survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. (Sugiyono, 2016:7).

Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2016:11).

Kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono, 2016:15)

3.2 Informan

Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. (Sugiyono, 2018:225).

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih individu atau kelompok yang dianggap memiliki informasi paling relevan dan mendalam terkait fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang kaya dan mendukung tujuan penelitian. (Sugiyono, 2018: 218). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III. 1 : Informan Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan

No	Unsur Informan	Jumlah		Percentase (%)
		informan	Key Informan	
1	Kadis	1	1	100%
2	Pegawai	3	3	100%
3	Pengelola Pasar	1	1	100%
3	Pedagang Kaki Lima	15	15	100%
Jumlah		20	20	100%

pemilihan informan menjadi aspek penting dalam memperoleh data yang relevan. Untuk menentukan informan dari kalangan pedagang kaki lima, penelitian ini menggunakan teknik eksidental sampling. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih pedagang yang secara kebetulan ditemui di lokasi penelitian dan bersedia memberikan informasi. Langkah-langkah dalam menentukan pedagang sebagai informan dimulai dengan mendatangi pasar tradisional berbasis modern di Teluk Kuantan saat jam operasional. Peneliti kemudian mengamati pedagang yang sedang berjualan dan mendekati mereka untuk diwawancara. Pemilihan pedagang juga mempertimbangkan variasi jenis

dagangan serta lama mereka berjualan agar data yang diperoleh lebih beragam dan representatif terhadap kondisi PKL di pasar tersebut.

Tetapi, jika setelah mewawancara 5 informan ternyata data yang diperoleh belum menjawab permasalahan penelitian atau kurang mendalam, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kembali relevansi informan yang telah dipilih. Jika sebagian besar dari mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, maka teknik sampling perlu disesuaikan. Dalam hal ini, teknik purposive sampling dapat diterapkan dengan memilih informan yang memiliki pengalaman langsung terhadap kebijakan tersebut, seperti pedagang yang pernah menerima bantuan pemerintah, pedagang yang aktif dalam komunitas PKL, atau mereka yang pernah mengalami relokasi akibat kebijakan penataan. Jika masih ditemukan kesulitan dalam mendapatkan informan yang sesuai, teknik snowball sampling bisa digunakan, di mana informan yang telah diwawancara diminta untuk merekomendasikan pedagang lain yang lebih memahami kebijakan terkait. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan PKL di pasar tersebut.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data primer

Menurut Sugiyono (2016:156) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Data Primer adalah data yang merujuk

kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama kali. Jenis data ini disusun dan dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu.

3.3.2 Data sekunder

Data Sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain (Sugiyono, 2016:137).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Implementasi Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan.

3.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Jl. Patimura Komplek Pemda 29562, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020:105) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/Triangulasi (observasi, wawancara, dan observasi).

3.6.1 Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

3.6.2 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.

3.6.4 *Triangulasi*

Menurut Sugiyono (2014:125) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik Triangulasi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019:112) adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini dapat bervariasi tergantung pada jenis data yang digunakan , tujuan penelitian, dan pendekatan yang diambil, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian, metode analisis berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam

tentang fenomena yang diteliti, serta untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana Menurut Miles dan Huberman (2017:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi dilapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna menurut Sujana (dalam Sujarweni, 2014:5).

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada ide itu (Bogdan dan Taylor, 2015:254).

3.7.1 Pengumpulan Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Kiwang, 2016:123) pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mendapatkan informasi dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Tujuannya adalah mengumpulkan data mentah yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, data dikumpulkan dalam bentuk deskriptif yang kaya untuk mendukung analisis lebih lanjut. Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

3.7.2 Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Kiwang, 2016:124) reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah untuk

membuatnya lebih fokus dan bermakna. Data yang tidak relevan disaring, sementara informasi yang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian dipertahankan. Proses ini membantu peneliti memahami dan menafsirkan temuan dengan lebih mudah.

3.7.3 Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Unigal, 2018:45) penyajian data adalah penyusunan informasi dalam format yang terorganisir, seperti tabel, diagram, grafik, atau narasi. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pola, hubungan, dan temuan yang muncul dalam data, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan.

3.7.4 Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman (dalam Unigal, 2018:47) pengambilan keputusan atau verifikasi adalah proses di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun dan dianalisis. Verifikasi dilakukan dengan mengevaluasi data secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut valid, konsisten, dan dapat dipercaya

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan dapat di lihat pada tabel III. 2 berikut :

Tabel III. 2 : Jadwal Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2024/2025															
		November				Desember				Januari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul																
2.	Pembuatan proposal																
3.	Bimbingan Proposal																
4.	Ujian Proposal																
5.	Revisi proposal																
6.	Bimbingan Skripsi																
7.	Ujian Skripsi																
8.	Revisi Skripsi																

Sumber : modifikasi peneliti tahun 2025

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dan Teluk Kuantan sebagai Ibu Kotanya. Kota Teluk Kuantan berjarak 160 km dari Ibu Kota Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Sejak tanggal 12 Oktober tahun 1999 Kabupaten Kuantan Singingi resmi menjadi sebuah kabupaten di Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan yang dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Selang waktu 11 tahun kemudian dimekarkan lagi 3 kecamatan baru yakni Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau. Sampai dengan saat ini Kabupaten Kuantan Singingi resmi memiliki 15 kecamatan, yakni Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Cerenti, Inuman, Sentajo Raya, Kuantan Hilir Seberang, Pucuk Rantau.

Sejak Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk, Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian Bupati hingga sekarang. Adapun pejabat-pejabat yang pernah menjadi Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV. 1 : Nama-nama Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dan Periode Menjabat

No	Nama Bupati	Periode Jabatan
1.	Drs. H. Rusdji S. Abrus	Periode Tahun 2000-2001
2.	Drs. H. Asrul Ja'afar	Periode Tahun 2001-2006
3.	H. Sukarmis	Periode Tahun 2006-2011
4.	H. Sukarmis	Periode Tahun 2011-2016
5.	Drs. H, Mursini, M.Si	Periode Tahun 2016-2021
6.	Suhardiman Amby, S.P.,M.M	Periode Tahun 2021-sekarang

Sumber:Data Olahan Penulis Tahun 2025

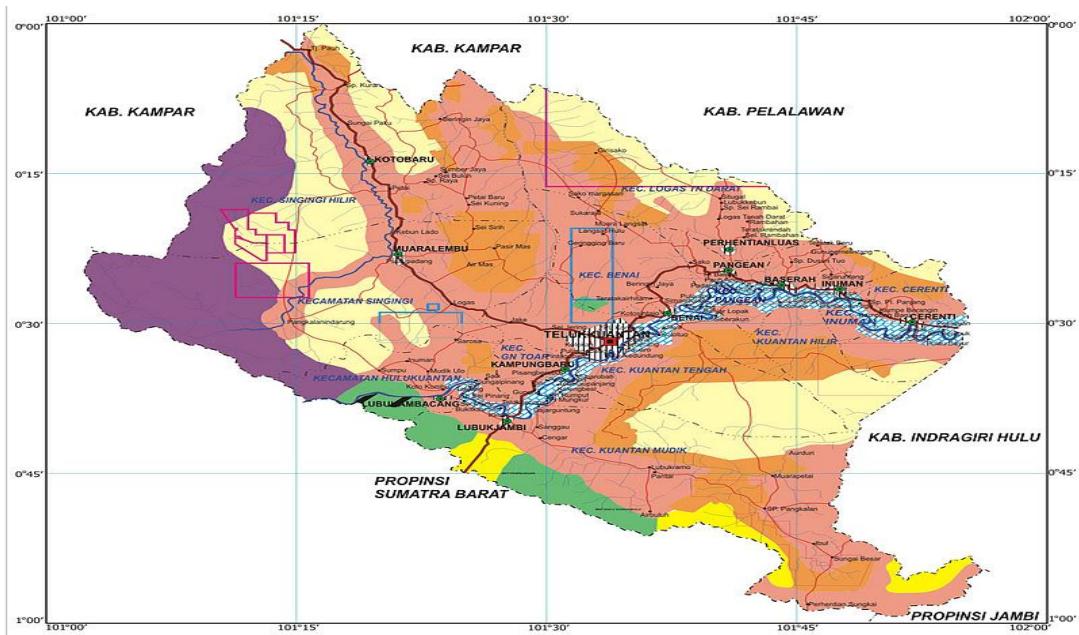
4.2 Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

- 4.2.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- 4.2.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
- 4.2.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

4.2.4 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Gambar IV.1 : Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: <https://kuansing.go.id/id/page/peta-wilayah.html>

Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singgingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singgingi ($1.953,66 \text{ km}^2$), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singgingi Hilir ($1.530,97 \text{ km}^2$). Gambaran umum luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan per kecamatan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel IV. 2 : Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Desa/Kelurahan		Total
			Desa	Kelurahan	
1	Kuantan Mudik	564,28	23	1	24
2	Hulu Kuantan	384,4	12	-	12
3	Gunung Toar	165,25	14	-	14
4	Singingi	1.953,66	13	1	14
5	Singingi Hilir	1.530,97	12	-	12
6	Kuantan Tengah	270,74	20	3	23
7	Benai	124,66	15	2	17
8	Kuantan Hilir	148,77	14	2	16
9	Pangean	145,32	17	-	17
10	Logas Tanah Darat	380,34	15	-	15
11	Cerenti	456,00	11	2	13
12	Inuman	145,70	14	-	14
13	Sentajo Raya	114,29	14	-	14
14	Kuantan Hilir Seberang	821,64	15	-	15
15	Pucuk Rantau	7.656,03	10	-	10
Total		7.656,03	218	11	229

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

4.3 Kondisi Geografis dan Karakteristik Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Secara morfologi Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi, dan pegunungan dengan ketinggian berkisar 25-30 meter dari permukaan laut. Berdasarkan ketinggiannya Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari beberapa jenis ketinggian, sedangkan berdasarkan kemiringan tanah di Kabupaten Kuantan Singingi terbagi

atas 0-2%, 2-5%, dan >25-40%. Secara struktur geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar, dan lipatan.

Disamping itu, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam yang dapat digali dan dimanfaatkan sebagai sumber PAD untuk pembangunan ekonomi, seperti Batubara, Emas, Sirtu, Kaolin, Bentonit, Bitumen Padat, Batu Gamping, dan Mangan. Sebagian dari potensi sudah dieksplorasi, antara lain yaitu Batubara, Emas, dan Mangan.

Untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Singingi mengaliri 2 (dua) kecamatan yaitu Singingi dan Singingi Hilir. Keberadaan Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi mempunyai peranan yang sangat penting terutama sebagai sarana pemanfaatan bagi masyarakat baik segi transportasi, sumber air irigasi, usaha perikanan, dan memiliki potensi sumber daya buatan untuk menghasilkan pasokan listrik tenaga air Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum di siang hari berkisar antara $32,6^{\circ}\text{C} - 36,5^{\circ}\text{C}$ dan suhu udara minimum di malam hari berkisar antara $19,2^{\circ}\text{C} - 22,0^{\circ}\text{C}$.

4.4 Kondisi Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

4.4.1 Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2023 penduduk tercatat sebanyak 356.246 jiwa yang terdiri 180.929 jiwa laki-laki dan 175.317 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya di Kecamatan Kuantan Tengah, yaitu 54.381 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan, yaitu 4.969

jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singgingi di setiap Kecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 3 : Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singgingi Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Dan Perempuan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kuantan Mudik	13.175	12.852	26.027
2	Kuantan Tengah	27.272	27.109	54.381
3	Singingi	18.779	17.766	36.545
4	Kuantan Hilir	7.419	7.338	14.757
5	Cerenti	8.571	8.176	16.747
6	Benai	8.870	8.884	17.754
7	Gunung Toar	7.319	7.121	14.440
8	Singingi Hilir	23.308	22.016	45.324
9	Pangean	10.625	10.426	21.051
10	Logas Tanah Darat	13.629	12.964	26.593
11	Inuman	8.732	8.263	16.995
12	Hulu Kuantan	4.969	4.972	9.941
13	Kuantan Hilir Seberang	5.706	5.703	11.409
14	Sentajo Raya	16. 465	16.031	32.496
15	Pucuk Rantau	6.090	5.696	11.768

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2023

4.4.2 Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat rata-rata dalam bidang pertanian.

Sebanyak 61,95% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu masyarakat juga banyak memanfaatkan sektor lain seperti perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri.

4.5 Sejarah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Perdagangan

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Terletak dikomplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi , yang dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Daerah serta dinas/lembaga/badan yang terkait dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu dinas yang menjadi unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian. Dinas Koperasi ini berdiri pada tahun 1999 yang awalnya bernama Dinas Perindustrian ,Perdagangan, dan Koperasi dengan beralamatkan Jalan Proklamasi Gang Perindustrian Sei. Jering Teluk Kuantan. Pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah tentang pembentukan susunan dimana dirubah menjadi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dan dipindah ke alamat Jalan Patimura Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Seiring berkembangnya koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016, Pemerintah Daerah mengeluarkan kembali Peraturan baru menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.

4.6 Visi Dan Misi

4.6.1 Visi

Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian adalah “Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat dalam rangka menunjang kemandirian UMKM”.

Adapun pengertian yang pokok-pokok visi dapat diterjemahkan sebagai berikut:

4.6.1.1 Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian yang maju.

4.6.1.2 Koperasi UKM, industri dan perdagangan termasuk salah satu sektor ekonomi, yang merupakan pelaku usaha sektor pertanian, jasa, konsumen, produsen, serta simpan pinjam harus maju dengan dibina melalui menganggarkan setiap tahunnya dalam jangka lima tahun kedepan.

4.6.1.3 Tangguh dan mandiri berarti tidak terpengaruh oleh gejolak ekonomi, dan mandiri dapat berdiri dan ditopang dari kekuatan sendiri maka dalam hal ini perlu diberi motivasi untuk berusaha secara berkelanjutan.

4.6.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan beberapa Misi, sebagai berikut:

4.6.2.1 Meningkatkan kwalitas sarana dan prasarana serta sumber pelayanan.

4.6.2.2 Memberikan pelayanan terbaik kepada UMKM dengan cepat terarah.

4.6.2.3 Mengembangkan sistem pelayanan melalui informasi dan teknologi yang mudah di akses.

4.6.2.4 Meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui pelayanan yang prima.

Adapun Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

4.6.3 Koperasi, Usaha Kecil, Menengah

4.6.3.1 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui bimbingan dan pelatihan.

4.6.3.2 Pembinaan dan pengawasan koperasi.

4.6.3.3 Tersedianya data koperasi dan UKM yang *update*.

4.6.3.4 Peningkatan SDM UKM melalui bimbingan dan pelatihan.

4.6.3.5 Peningkatan pemasaran dan mitra usaha UKM, pengembangan produk unggulan UKM.

4.6.4 Perdagangan

4.6.4.1 Menumbuh kembangkan perdagangan dan jasa kreatif dan inovatif.

4.6.4.2 Meningkatkan peran perdagangan dalam negeri dan perlindungan terhadap konsumen dan kemetrologian.

4.6.4.3 Meningkatkan kelancaran dan stabilitas sistem distribusi serta pengamanan pasar dalam negeri.

4.6.4.4 Pengendalian peredaran barang dan jasa serta barang yang diatur tata niaganya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen.

4.6.5 Perindustrian

4.6.5.1 Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha.

4.6.5.2 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui bimbingan teknis.

4.6.5.3 Peningkatan produktifitas dan penguasaan teknologi melalui bantuan sarana dan prasarana produksi.

4.7 Tugas dan Fungsi

4.7.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan monitorin, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
2. Pengkoordinasian dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.

3. Pelaksanaan fasilitasi dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
5. Pelaksanaan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
6. Pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
7. Pengawasan dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
8. Pengendalian dan monitoring dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
9. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

4.7.2 Bagian Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan

prasaranan, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.

3. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 4. Pengelolaan data
 5. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan.
 6. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
 7. Penyelenggaraan ketatausahaan.
 8. Pembinaan kepegawaian.
 9. Pengelolaan sarana dan prasarana.
 10. Penyelenggaraan urusan rumah tangga.
 11. Penyelenggaraan perjalanan dinas.
 12. Penyelenggaraan fungsi kehumasan.
 13. Penyelenggaraan keprotokoleran.
 14. Pengelolaan keuangan.
 15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

4.7.3 Bidang Perdagangan

1. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang perdagangan.
3. Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan.
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang perdagangan
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perdagangan.
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - f. Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Perdagangan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan,

- evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bina Usaha dan Sarana Prasarana Perdagangan.
- b. Seksi Informasi Pasar, Promosi, dan Penataan Perdagangan. dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Informasi Pasar, Promosi, dan Penataan Perdagangan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Seksi Informasi Pasar, Promosi, dan Penataan Perdagangan.
- c. Seksi Pengawasan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengawasan perdagangan.

4.8 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaa Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian

4.8.1 Tugas

Dinas sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, serta tugas pembantu yang diberikan Pemerintah Daerah.

4.8.2 Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis dibidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.9 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

4.10 Data Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	DELIS MARTONI, SE.,M.M NIP. 197003052000031005	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas
2.	JUNAIDI, S.T.,M.Si NIP. 197206042005011008	Pembina Tk. I (IV/b)	Seketaris
3.	YEAN ASNUDI, M.Pd NIP. 196911251995121001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Perdagangan
4.	ENDRIPON, S.Pd NIP. 197210112006041011	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Koperasi UMKM
5.	SAPRIALIS, S.Sos NIP. 197907012006041013	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Perindustrian
6.	EDDI, S.Pd NIP. 197606122000121001	Pembina Tk.I (IV/a)	Kepala Uptd Metrologi Legal
7.	HENI ROSNETI, S.P.,M.P NIP. 197304272007012006	Pembina Tk.I (IV/a)	Pengawas Koperasi Ahli Muda
8.	ADERIO, S.P NIP. 197606112000121002	Penata Tk. I (III/d)	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda
9.	RAMON RAMZI, S.T NIP. 197909082005011005	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluhan Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda
10.	HERLINAWATI, S.P NIP. 196809302003122003	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda
11.	ILMEY ASVERA, S.P NIP. 197205312008012004	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluhan Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda
12.	TETIN ANGDRIANY, S.Sos NIP. 198104222008012012	Penata Tk. I (III/d)	Pengawas Koperasi Ahli Muda
13.	ROMI YUGIHARA, S.T NIP. 198106202010011028	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Umum
14.	DESI ARISANDI, S.E NIP. 197606242007012003	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Program Dan Keuangan
15.	WIRDA HANUM, S.E NIP. 197912142010012003	Penata (III/c)	Kepala TU UPTD Metrologi Legal
16.	SRI YUDIANINGSIH, S.E	Penata Tk. I	Analisis Tata Usaha

	NIP. 197905222008012010	(III/d)	
17.	INDAYANI, S.E NIP. 197912122008012020	Penata Tk. I (III/d)	Penata Keuangan
18.	KRISTINA HANDAYANI, S.E.,M.E NIP. 198405032008012006	Penata Tk. I (III/d)	Bendahara
19.	DARLIN SUSANTI, S.E NIP. 198308092008012003	Penata (III/c)	Fasiliator Perdagangan
20.	VICTREN HARISANTO, S.E NIP. 198103092010011014	Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Muda
21.	HARIYATI SINTAYUANA, S.E NIP. 197307122007012002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro Kecil Dan Menengah
22.	AZRIWATUN NIP. 197304262008011005	Pengatur Tk.I (II/d)	Juru Pungut Retribusi
23.	SANDHI SANTOSO, A.Md NIP. 198810252020121003	Pengatur Tk.I (II/d)	Pranata Koperasi
24.	HENDRA NIP. 198507082012121009	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Juru Pungut Retribusi

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan
Perindustrian Tahun 2025

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dari informan. Jumlah informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan. Data-data yang penulis peroleh dari data primer akan diuraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan wawancara langsung kepada pihak terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan, untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara responden didapati jenis kelamin responden sebagai berikut:

Tabel V.I : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	11	55%
2	Perempuan	9	45%
Jumlah		20	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2025

Tabel diatas dapat dilihat bahwa informan untuk penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Modern Teluk Kuantan lebih banyak didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 11 orang (55%), sedangkan untuk perempuan 9 orang (45%).

5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

Usia merupakan tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa saja yang tidak harus dilakukan. Disamping itu tidak dipungkiri juga bahwa usia juga mempengaruhi fisik seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tua usia seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelebihan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan usianya yang lebih muda.

Berikut ini telah dikelompokkan jumlah responden berdasarkan usia yang telah peneliti kelompokkan dalam 4 kategori yaitu usia 20-30 Tahun, 31-40 Tahun, 41-50 Tahun, dan 51-60 Tahun. Untuk lebih jelasnya informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel V.2 dibawah ini:

Tabel V.2 : Klasifikasi Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	20-30	2	10%
2	31-40	7	35%
3	41-50	8	15%
4	51-60	3	15%
Jumlah		20	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2025

Dari tabel V.2 dapat dilihat bahwa jumlah informan yang berusia 20-30 tahun sebanyak 2 orang (10%), antara usia 31-40 tahun sebanyak 7 orang (35%),

antara usia 41-50 sebanyak 8 orang (40%), dan tidak ada informan yang berusia 51-60 tahun berjumlah 3 orang (15%).

5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian, atau sikap agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan serta merupakan usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan akan membuat matang pola pikirnya dalam berbuat dan bertingkah laku serta dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mengenai tingkat pendidikan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3 : Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTA	10	50%
2	Diploma	-	-
3	Strata I	8	30%
4	Strata II	2	20%
Jumlah		20	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan SLTA sebanyak 10 orang (50%), dan Strata I sebanyak 8 orang (30%), serta Strata II sebanyak 2 orang (20%).

5.1.4 Informan Menurut Status Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai status pekerjaan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4 : Karakteristik Informan Menurut Status Pekerjaan

No	Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Dinas	1	5%
2	Kabid Perdagangan	1	5%
3	Pegawai	1	5%
4	Pedagang	17	85%
Jumlah		20	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2025

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan

Berdasarkan indikator tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan penulis menggunakan teori model implementasi dari Edward III dalam analisis ini beberapa kriteria yang digunakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka dibawah ini akan dipaparkan hasil penelitian yang akan menjelaskan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan, dapat dilihat dari tiap-tiap indikator dibawah ini.

5.2.1 Indikator Komunikasi

Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan adalah suatu proses penyampaian informasi, perintah, atau instruksi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, sehingga pelaksana memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan.

5.2.1.1 Sub Indikator Transmisi

Transmisi adalah proses penyampaian informasi atau instruksi dari pembuat kebijakan kepada pihak pelaksana kebijakan. Tujuannya agar pihak pelaksana menerima informasi yang akurat dan utuh seperti yang dimaksud oleh pembuat kebijakan. Kalau proses transmisi ini terganggu misalnya dalam hambatan teknis, birokrasi yang rumit, atau saluran komunikasi yang tidak efektif maka pelaksana bisa salah memahami kebijakan tersebut.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Yean Asnudi, M.Pd selaku Kabid Perdagangan:

“sudah, kami dari diskopdagrin memang rutin melakukan pendekatan langsung ke pedagang. Kami jelaskan aturan-aturan penataan ini, supaya mereka paham dan tidak merasa kebingungan. Jadi bukan cuma sekali sosialisasi, tapi juga disampaikan terus saat dilapangan.” (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan ibu Desi Arisandi, S.E selaku Kasubbag Program Keuangan:

“Iya, sudah ada upaya dari kami untuk menyampaikan informasi ini ke pedagang. Biasanya lewat pertemuan langsung, kadang juga secara informal saat kami turun ke lokasi. Intinya kami ingin mereka benar-benar mengerti aturan yang berlaku”. (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan Ibu Herlinawati, S.P selaku Sub Koordinator Jabatan Fungsional Substansi pengawasan perdagangan:

“Sudah, Kami pastikan informasi soal penataan ini sampai ke semua pedagang. Jadi kami tidak hanya mengumumkan, tapi juga tanya balik apakah mereka paham atau butuh penjelasan ulang. Itu bagian dari tugas kami juga”. (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut jawaban dari hasil wawancara dengan pedagang yaitu ibu Dasimah, bapak Ujang, ibu Een, bapak yono, dan ibu Desi:

“Sudah, kami udah dikasih tau aturan-aturan dari dinas. Waktu itu ada petugas yang datang dan jelaskan soal penataan ini. jadi kami paham harus jualan di tempat yang udah disediakan”.(Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

Kemudian jawaban yang hampir serupa dari pedagang lainnya yaitu bapak Mulyono, ibu Gina, bapak Eko, ibu Eka, dan bapak Amin:

“Sudah, dulu pernah dikumpulkan, terus dijelaskan aturannya oleh petugas dari dinas. Jadi kami ngerti kenapa kami dipindahkan dan bagaimana cara jualan yang sesuai aturan”.(Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

5.2.1.2 Sub Indikator Kejelasan

Kejelasan adalah tingkat kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan dalam kebijakan tersebut. informasi kebijakan harus mudah dipahami, tidak multitafsir, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan pemahaman pelaksana di lapangan. Kalau isi kebijakan terlalu kompleks atau ambigu, maka akan sulit diimplementasikan dengan benar karena pelaksana bisa bingung atau salah tafsir.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Yean Asnudi, M.Pd selaku Kabid Perdagangan:

“Sudah, kami sampaikan secara jelas kepada semua pihak terkait, termasuk pedagang. Kami pastikan mereka mengerti isi peraturan, bukan hanya sekadar tahu”.(Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Kemudian kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Desi Arisandi, S.E selaku Kasubbag Program Keuangan:

“Iya, kami berusaha menjelaskan peraturan penataan ini dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau ada yang bingung, kami terbuka untuk memberikan penjelasan ulang.” (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Selanjutnya kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Herlinawati, S.P selaku Sub Koordinator Jabatan Fungsional Substansi pengawasan perdagangan:

“Sudah, kami jelaskan secara rinci tentang aturan penataan, supaya para pedagang tidak salah paham dan bisa mengikuti aturan yang berlaku.” (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut jawaban dari hasil wawancara dengan pedagang yaitu ibu Dasimah, bapak Ujang, ibu Een, bapak yono, dan ibu Desi:

“Sudah. Dari dinas bilang dengan jelas, misalnya kami nggak boleh berjualan di trotoar lagi. Mereka kasih tahu tempat baru dan aturannya, jadi nggak bingung.” (Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

Kemudian kutipan jawaban dari pedagang lainnya yaitu bapak Mulyono, ibu Gina, bapak Eko, ibu Eka, dan bapak Amin:

“Iya, udah jelas. Dulu waktu kami pindah, dijelaskan juga kenapa harus pindah dan gimana aturan tempat baru. Jadi kami ikut aja, karena udah ngerti.” (Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

5.2.1.3 Pembahasan Indikator Komunikasi

Transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi atau kebijakan dari pembuat atau pelaksana kebijakan kepada pihak yang menjadi pelaksana teknis maupun sasaran kebijakan. Transmisi yang baik ditandai dengan adanya penyampaian informasi yang langsung, rutin, dan menjangkau semua pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Adapun hasil dari wawancara di lapangan menunjukkan bahwa proses transmisi telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Diskopdagrin seperti Bapak Yean Asnudi, M.Pd, Ibu Desi Arisandi, S.E, dan Ibu Herlinawati, S.P, diketahui bahwa proses penyampaian informasi sudah dilakukan secara langsung kepada para pedagang. Salah satu contohnya, Bapak Yean Asnudi menyampaikan bahwa mereka rutin melakukan pendekatan ke pedagang untuk menjelaskan aturan-aturan penataan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pedagang seperti Ibu Dasimah yang mengatakan bahwa aturan sudah disampaikan langsung oleh petugas. Hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi informasi dalam kebijakan ini sudah berjalan dengan baik.

Dari sisi kejelasan, baik pelaksana maupun pedagang menyatakan bahwa isi kebijakan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ibu Desi Arisandi menjelaskan bahwa mereka berusaha menjelaskan aturan penataan dengan jelas dan terbuka untuk memberikan penjelasan ulang jika ada yang tidak mengerti. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan pedagang seperti Pak Ujang, yang mengaku tidak bingung lagi karena aturan sudah dijelaskan secara rinci oleh dinas. Dengan

demikian, kejelasan isi kebijakan sudah cukup baik dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Secara keseluruhan, indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan penataan PKL ini sudah berjalan dengan cukup efektif, baik dari segi penyampaian (transmisi) maupun isi informasi (kejelasan), sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan di lapangan.

5.2.2 Indikator Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya di sini mencakup segala bentuk dukungan yang diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik pun akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal di lapangan.

5.2.2.1 Sub Indikator Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam teori George C. Edwards III (1980), keberadaan SDM yang kompeten dan memadai menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. SDM yang dimaksud tidak hanya cukup secara jumlah, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan, mampu menjalankan tugasnya dengan profesional, serta memiliki komitmen terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Tanpa SDM yang memadai, proses seperti sosialisasi, pengawasan, hingga pelayanan di lapangan akan mengalami hambatan, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Yean Asnudi, M.Pd selaku Kabid Perdagangan:

“Kalau menurut saya, SDM yang kami miliki saat ini sudah memadai. Setiap bidang punya petugas yang sudah memahami tugasnya masing-masing, dan kami juga sudah cukup terbiasa menghadapi situasi di lapangan.” (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Kemudian kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Desi Arisandi, S.E selaku Kasubbag Program Keuangan:

“Kami merasa SDM yang ada sudah mampu menangani permasalahan yang muncul di lapangan. Kami juga sering turun langsung dan kerja sama antar staf cukup solid. Kalau ada kendala, kami diskusikan dan cari solusinya bersama”. (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan Ibu Herlinawati, S.P selaku Sub Koordinator Jabatan Fungsional Substansi pengawasan perdagangan:

“Dari segi jumlah dan kemampuan, alhamdulillah SDM kami sudah cukup. Memang kadang ada tantangan di lapangan, tapi sejauh ini masih bisa diatasi. Kami juga terus belajar dan beradaptasi dengan kondisi.”(Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut jawaban dari hasil wawancara dengan pedagang yaitu ibu Dasimah, bapak Ujang, ibu Een, bapak yono, dan ibu Desi:

“Menurut kami petugas dari dinas itu cukup cekatan, mereka tahu harus ngapain di lapangan. Waktu kami tanya soal tempat jualan dan aturan, mereka bisa jelaskan dengan baik. Jadi kami rasa SDM-nya sudah bagus.”(Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

Kemudian jawaban yang hampir serupa dari pedagang lainnya yaitu bapak Mulyono, ibu Gina, bapak Eko, ibu Eka, dan bapak Amin:

“Kami lihat petugasnya ramah dan bisa jelaskan aturan dengan jelas. Mereka juga nggak asal marah atau nyuruh pindah. Jadi menurut kami orang-orang dari dinas itu udah paham kerjaannya, ya berarti SDM-nya oke.” (Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

5.2.2.2 Sub Indikator Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial atau keuangan adalah aspek pendukung penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan dana yang cukup memungkinkan pelaksana kebijakan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi kebijakan, penyediaan fasilitas, pemberdayaan pelaku sasaran, hingga pengawasan. Menurut Edwards III, tanpa dukungan finansial yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat atau tidak dapat berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan agar kebijakan yang dirancang dapat direalisasikan secara efektif.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Yean Asnudi, M.Pd selaku Kabid Perdagangan:

“Kalau soal finansial, terus terang masih belum begitu mencukupi. Kegiatan penataan dan pemberdayaan ini butuh biaya yang lumayan, apalagi kalau menyangkut pembangunan fasilitas atau sosialisasi yang lebih luas. Tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada.” (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Kemudian kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Desi Arisandi, S.E selaku Kasubbag Program Keuangan:

“Dari sisi pendanaan memang kami masih cukup terbatas. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini kadang belum bisa menjangkau semua kebutuhan di lapangan. Jadi, kadang beberapa kegiatan harus ditunda atau disesuaikan dengan kondisi keuangan.” (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan Ibu Herlinawati, S.P selaku Sub Koordinator Jabatan Fungsional Substansi pengawasan perdagangan:

“Kalau boleh jujur, kami merasa sangat kekurangan dari sisi finansial. Banyak rencana bagus yang nggak bisa dijalankan karena dananya belum tersedia. Sementara kebutuhan untuk mendukung penataan dan pemberdayaan itu kan terus berkembang.” (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut jawaban dari hasil wawancara dengan pedagang yaitu ibu Dasimah, bapak Ujang, ibu Een, bapak yono, dan ibu Desi:

“Kalau saya lihat sih dari dinasnya memang belum banyak bantuan langsung ke pedagang. Kadang mereka cuma bisa kasih arahan, tapi buat fasilitas atau bantuan usaha belum begitu terasa. Mungkin karena dananya terbatas ya” (Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

Kemudian jawaban yang hampir serupa dari pedagang lainnya yaitu bapak Mulyono, ibu Gina, bapak Eko, ibu Eka, dan bapak Amin:

“Menurut saya programnya udah bagus, cuma belum semua terlaksana. Kayak tempat jualan atau pelatihan itu masih kurang. Jadi mungkin dari dinasnya belum cukup dana untuk jalanin semua rencana.” (Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

5.2.2.3 Pembahasan Indikator Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa dari sisi sumber daya manusia, implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dinilai sudah memadai. Bapak Yean Asnudi, M.Pd menyampaikan bahwa petugas yang ada sudah memahami tugasnya masing-masing dan mampu menjalankan perannya di lapangan dengan baik. Hal ini juga didukung

oleh pernyataan Ibu Desi Arisandi, S.E dan Ibu Herlinawati, S.P yang menyatakan bahwa petugas di lingkungan Diskopdagrin memiliki kerja sama yang solid dan mampu merespons permasalahan dengan cepat.

Penilaian dari pedagang juga memperkuat hal ini. Ibu Dasimah menilai bahwa petugas dinas cukup cekatan dan mampu menjelaskan aturan dengan jelas. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ujang dan Ibu Een yang menilai bahwa petugas bersikap ramah, tanggap, dan hadir langsung ke lapangan dalam menangani persoalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan kompetensi SDM di Diskopdagrin telah mendukung pelaksanaan kebijakan ini secara cukup optimal.

Berbeda dengan SDM, hasil wawancara menunjukkan bahwa dari sisi finansial, pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima masih mengalami kendala. Pegawai Diskopdagrin, seperti Bapak Yean Asnudi, M.Pd, menyatakan bahwa dana yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan, terutama dalam hal pembangunan fasilitas dan sosialisasi yang luas. Ibu Desi Arisandi, S.E juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan harus ditunda atau disesuaikan. Bahkan, Ibu Herlinawati, S.P secara tegas menyebut bahwa kondisi keuangan dinas masih sangat kekurangan dalam mendukung pelaksanaan program ini.

5.2.3 Indikator Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana adalah salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi merujuk pada sejauh mana pelaksana kebijakan memahami, menerima, dan memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Meskipun suatu kebijakan telah dirancang dengan jelas, memiliki SDM yang memadai, dan sumber daya yang cukup, jika pelaksana di lapangan tidak memiliki sikap yang mendukung atau bahkan menolak, maka implementasi kebijakan bisa mengalami kegagalan.

5.2.3.1 Sub Indikator Sikap

Sikap merupakan bagian dari indikator disposisi yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Sikap dalam konteks ini merujuk pada pandangan, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan (dalam hal ini pegawai atau petugas di lapangan) dalam menerima dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Edwards III (1980), meskipun pelaksana memiliki pemahaman yang baik terhadap isi kebijakan, sikap yang negatif seperti tidak peduli, enggan melaksanakan, atau tidak mendukung secara penuh dapat menjadi hambatan besar dalam implementasi.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Yean Asnudi, M.Pd selaku Kabid Perdagangan:

“Karakteristik pegawai kami cukup beragam. Masing-masing punya pendekatan dan cara tersendiri dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tapi secara umum, kami berusaha tetap profesional, ramah, dan komunikatif kepada pedagang. Tentu tidak semua berjalan mulus karena karakter pedagang juga bermacam-macam.”(Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Kemudian kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Desi Arisandi, S.E selaku Kasubbag Program Keuangan:

“Karakter pegawai itu tergantung juga pada kondisi di lapangan. Kalau pedagangnya kooperatif, ya kita juga bisa santai, ramah, dan terbuka. Tapi kalau ada yang sulit diatur, kadang kita juga harus tegas. Tapi tetap, kami berusaha untuk tetap sabar dan menjalankan kebijakan sesuai aturan.”(Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan Ibu Herlinawati, S.P selaku Sub Koordinator Jabatan Fungsional Substansi pengawasan perdagangan:

“Menurut saya, karakter pegawai dalam melaksanakan kebijakan ini sudah baik, meski tentu beda-beda karena tiap orang punya gaya pendekatan sendiri. Ada yang lebih tegas, ada yang lebih sabar. Tapi pada dasarnya, kami semua berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan tetap menjalankan tugas sesuai arahan.”(Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut jawaban dari hasil wawancara dengan pedagang yaitu ibu Dasimah, bapak Ujang, ibu Een, bapak yono, dan ibu Desi:

“Menurut saya petugas dinas orangnya baik-baik, ramah, dan kalau menjelaskan aturan juga jelas. Kadang memang ada yang terlihat tegas, tapi saya rasa itu wajar supaya pedagang tertib. Selama ini mereka memperlakukan kami dengan cukup baik.”(Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

Kemudian jawaban yang hampir serupa dari pedagang lainnya yaitu bapak Mulyono, ibu Gina, bapak Eko, ibu Eka, dan bapak Amin:

“Karakter pegawai dinas macam-macam sih. Ada yang sabar banget, ada juga yang galak kalau kita melanggar aturan. Tapi ya kami paham juga, mungkin karena mereka capek menghadapi banyak pedagang yang susah diatur. Tapi niat mereka bagus kok.”(Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

5.2.3.2 Pembahasan Indikator Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa karakteristik pegawai dalam melaksanakan kebijakan cukup beragam. Bapak Yean Asnudi, M.Pd menyampaikan bahwa setiap pegawai memiliki karakteristik pribadi masing-masing, namun secara umum tetap profesional dalam bekerja. Ibu Desi Arisandi, S.E juga menyebut bahwa karakter pegawai bisa berubah tergantung kondisi lapangan, khususnya jika menghadapi pedagang yang sulit diatur. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Herlinawati, S.P yang menilai bahwa pendekatan masing-masing pegawai berbeda, namun tetap berlandaskan pada aturan dan tanggung jawab.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum sikap pelaksana kebijakan sudah cukup baik dan mendukung keberhasilan implementasi, meskipun dalam praktiknya tetap diperlukan pendekatan yang fleksibel sesuai dengan dinamika lapangan.

5.2.4 Indikator Struktur Birokrasi

struktur birokrasi mengacu pada bagaimana sistem organisasi, alur kerja, pembagian wewenang, serta prosedur operasional dalam suatu lembaga diatur dan dijalankan. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir akan memudahkan proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sebaliknya, jika struktur birokrasi terlalu kaku, tidak efisien, atau tumpang tindih, maka implementasi kebijakan dapat terhambat.

5.2.4.1 Sub Indikator Fragmentasi

Fragmentasi merupakan salah satu sub indikator dari struktur birokrasi dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980). Fragmentasi merujuk pada sejauh mana tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebar di antara berbagai unit, bidang, atau lembaga yang terlibat. Ketika pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak aktor atau instansi, maka koordinasi menjadi faktor penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, kebingungan dalam pelaksanaan tugas, maupun konflik internal.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Yean Asnudi, M.Pd selaku Kabid Perdagangan:

“Pembagian tugas antar dinas maupun antar bidang dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah cukup jelas. Kami bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan, hanya saja memang dalam pelaksanaannya di lapangan terkadang menghadapi tantangan karena pedagang sendiri sulit diatur.”(Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Kemudian kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Desi Arisandi, S.E selaku Kasubbag Program Keuangan:

“Kalau dari sisi struktur dan pembagian tugas, saya rasa sudah jelas dan tidak membingungkan. Masing-masing bidang sudah tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar.”(Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan Ibu Herlinawati, S.P selaku Sub Koordinator Jabatan Fungsional Substansi pengawasan perdagangan:

“Kami bekerja sesuai dengan tugas yang sudah ditetapkan oleh dinas. Tidak ada tumpang tindih atau kebingungan karena semua sudah diatur sesuai tupoksi. Tantangan lebih banyak datang dari kondisi di lapangan, bukan dari sisi struktur birokrasi.” (Teluk Kuantan, 19 Maret 2025)

Berikut jawaban dari hasil wawancara dengan pedagang yaitu ibu Dasimah, bapak Ujang, ibu Een, bapak yono, dan ibu Desi:

“Saya rasa petugas di lapangan sudah tahu tugas masing-masing. Kadang kami lihat mereka kerja bareng dan saling bantu. Tapi ya, kami sebagai pedagang juga kadang susah diatur, jadi memang butuh kesabaran dari mereka juga.” (Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

Kemudian jawaban yang hampir serupa dari pedagang lainnya yaitu bapak Mulyono, ibu Gina, bapak Eko, ibu Eka, dan bapak Amin:

“Sudah jelas kok tugas pegawai dinas itu. Kalau ada masalah atau kami tanya soal tempat berjualan, mereka langsung arahkan ke bagian yang menangani. Jadi menurut saya tidak membingungkan, asal kami juga mau dengar dan patuh.” (Teluk Kuantan, 20 Maret 2025)

5.2.4.2 Pembahasan Indikator Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa pembagian tugas antar bidang maupun antar dinas yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dinilai sudah cukup jelas. Bapak Yean Asnudi, M.Pd menjelaskan bahwa pegawai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, walaupun di lapangan masih menghadapi tantangan karena pedagang sulit diatur. Ibu Desi Arisandi, S.E dan Ibu Herlinawati,

S.P juga menyatakan bahwa pembagian tugas sudah sesuai dengan tupoksi dan pelaksanaan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya tumpang tindih kewenangan.

Hal ini diperkuat oleh keterangan dari para pedagang kaki lima. Ibu Dasimah, Bapak Ujang, dan Ibu Een menyatakan bahwa pembagian tugas antar pegawai dinas terlihat jelas di lapangan. Para pedagang juga mengakui bahwa mereka dapat membedakan pegawai yang menangani penataan dan pengawasan. Meski demikian, sebagian pedagang menyampaikan bahwa mereka masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait perubahan atau pembaruan aturan yang diterapkan. Secara keseluruhan, struktur birokrasi dalam hal fragmentasi telah berjalan dengan baik, namun tetap memerlukan komunikasi dan pendekatan yang berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.

5.3 Analisa Hasil pembahasan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan

Dalam menganalisis implementasi kebijakan pemerintah mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan, peneliti menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Edward III yang menitikberatkan pada empat indikator utama, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan data dan hasil wawancara di lapangan, berikut adalah analisa masing-masing indikator tersebut:

5.3.1 Indikator Komunikasi

Analisa dari indikator komunikasi menunjukkan bahwa proses transmisi informasi kebijakan dari pemerintah kepada pelaksana maupun sasaran kebijakan telah berlangsung secara langsung, rutin, dan jelas. Petugas Diskopdagrin secara aktif melakukan pendekatan ke para pedagang melalui berbagai media, baik formal maupun informal, seperti pertemuan lapangan, sosialisasi langsung, dan diskusi personal.

Kejelasan pesan juga menjadi salah satu kekuatan dalam proses ini. Para pedagang menyatakan bahwa informasi yang mereka terima disampaikan secara lugas dan tidak membingungkan. Petugas dinas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam, dan terbuka untuk memberikan penjelasan ulang jika dibutuhkan. Hal ini menunjukkan kualitas komunikasi yang tinggi dan efektif, yang menjadi fondasi awal penting dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan teori Edward III, komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi menyebabkan rendahnya pemahaman PKL terhadap tujuan relokasi. Kurangnya sosialisasi dan ketidakjelasan informasi menjadi faktor utama resistensi pedagang, sehingga menghambat tercapainya tujuan kebijakan penataan PKL di Teluk Kuantan.

5.3.2 Indikator Sumber Daya

Dalam hal Sumber Daya Manusia, hasil penelitian memperlihatkan bahwa petugas dinas dinilai cukup kompeten dan memahami tugasnya. Mereka tidak

hanya memiliki pemahaman teknis yang baik, tetapi juga memperlihatkan kemampuan dalam berinteraksi sosial, seperti ramah, sabar, dan solutif saat menghadapi dinamika pedagang di lapangan. Kolaborasi dan solidaritas antarpegawai juga berjalan baik, yang semakin memperkuat pelaksanaan program.

Namun, pada aspek sumber daya finansial, ditemukan bahwa terdapat kendala signifikan yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan secara optimal. Keterbatasan anggaran mengakibatkan beberapa program strategis seperti penyediaan fasilitas fisik, pelatihan, atau bantuan langsung kepada pedagang menjadi belum terlaksana secara maksimal. Bahkan beberapa kegiatan terpaksa ditunda karena belum tersedia pendanaan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen dan kemampuan SDM telah memadai, dukungan anggaran masih menjadi hambatan utama.

Mengacu pada teori Edward III, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat dijalankan dengan optimal. Kondisi ini mengakibatkan ketidaknyamanan PKL di lokasi baru dan menurunkan efektivitas program relokasi.

5.3.3 Indikator Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)

Sikap dan karakter pegawai dalam menjalankan kebijakan sangat menentukan efektivitas di lapangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, pegawai Diskopdagrin menunjukkan sikap yang cenderung positif, adaptif, dan profesional.

Meski gaya pendekatan tiap individu berbeda, sebagian besar petugas mampu menyesuaikan pendekatan dengan karakter pedagang, menjaga komunikasi yang baik, dan tetap bersikap tegas namun tidak represif.

Pendapat dari para pedagang juga senada, menyatakan bahwa petugas cenderung bersikap baik dan komunikatif, meskipun ada kalanya mereka bersikap tegas dalam menghadapi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada disposisi pelaksana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa inkonsistensi sikap aparat berdampak pada lemahnya pelaksanaan di lapangan. Kurangnya komitmen dan ketidakseragaman tindakan memperlemah proses relokasi dan menyebabkan kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

5.3.4 Indikator Struktur Birokrasi

Meskipun belum dijabarkan secara mendalam dalam hasil wawancara, berdasarkan gambaran umum yang muncul dari respons para pegawai dan pedagang, struktur birokrasi tampaknya cukup responsif dan tidak menghambat proses implementasi. Adanya koordinasi antar bidang, keterbukaan dalam memberikan informasi, serta sistem kerja yang adaptif menjadi indikasi bahwa struktur organisasi telah berjalan cukup efektif, meskipun masih bisa dioptimalkan terutama dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan program yang berkelanjutan.

Teori Edward III menekankan pentingnya struktur birokrasi yang sederhana dan terkoordinasi. Ketidakjelasan struktur dan prosedur dalam penelitian ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan menjadi lambat dan tidak efektif. Kurangnya SOP dan lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan hambatan serius dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini membuktikan bahwa keempat indikator implementasi menurut Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) belum terpenuhi dengan baik. Komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, lemahnya komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang tidak efisien menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah perlu diperbaiki terutama dalam aspek komunikasi strategis, penyediaan fasilitas, pelatihan aparat, dan perbaikan koordinasi antar instansi agar tujuan relokasi PKL dapat terimplementasi dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan belum terimplementasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 6.2.1 Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kebijakan kepada PKL dengan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan berkelanjutan agar para pedagang dapat memahami dan menerima kebijakan relokasi dengan baik.
- 6.2.2 Perbaikan Fasilitas di Lokasi Relokasi: Penting untuk segera memperbaiki dan menambah fasilitas di lokasi relokasi, seperti aksesibilitas, sanitasi, dan sarana penunjang usaha, agar tempat tersebut menjadi lebih layak dan dapat mendukung kelangsungan usaha PKL.
- 6.2.3 Membangun Kemitraan dengan PKL: Pemerintah sebaiknya membangun kemitraan yang lebih kuat dengan PKL melalui forum dialog rutin, pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan akses terhadap permodalan,

agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan lebih menyeluruh dan efektif.

- 6.2.4 Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi: Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan efisien, tanpa adanya tumpang tindih kebijakan.
- 6.2.5 Pendekatan Humanis dalam Penataan: Proses relokasi dan penataan PKL sebaiknya lebih mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan pedagang. Pendekatan yang berbasis pada nilai kemanusiaan akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan PKL serta memastikan kebijakan berjalan lebih adil dan berkelanjutan.
- 6.2.6 Menata ulang posisi dan zonasi pedagang agar sesuai dengan rencana tata ruang pasar.
- 6.2.7 Menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pedagang.
- 6.2.8 Mengoptimalkan pemanfaatan bangunan pasar melalui pendekatan persuasif dan edukatif.
- 6.2.9 Menata sistem lalu lintas dan area parkir di dalam pasar agar tercipta kenyamanan dan keteraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus, Fahmi. 2018. Teori dan Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alma, Buchari. 2018. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2022. Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaho, Josef Riwu. 2016. Prospek Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Dedi. 2020. Manajemen Kebijakan Publik: Teori dan Praktik Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. (2015). Implementasi Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2021. Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Subarsono, AG. 2020. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soehartono, I. (2021). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2019. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahyudi, Yudi. 2019. Implementasi Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2022. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi. Malang: UMM Press.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.

B. Jurnal

- Arifin Tahir. (2015). "Implementasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Studi Kasus." *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 93–102.
- Afiati, A. N. (2020). Penataan Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang). Repository UIN Jakarta.
- Arlinda, D., & Dyah, R. S. (2017). Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang: Antara Strategi Bertahan Hidup dan Penataan Kota. *Jurnal Perkotaan*, 15(2), 1-10.
- Hamdi, R. (2015). "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 5(3), 36–45.
- Hasanuddin. (2019). Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 59–70.
- Istiqomah, N., Rahmawati, A., & Hidayati, S. 2023: 45. "Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota X." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 10 No. 1.
- Kiwang, E. (2016). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 20(3), 120–130. Universitas Gadjah Mada.
- Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120), 60–67.
- Rizkiyanty, D., et al. (2021). "Role of Bureaucracy in Policy Implementation." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 55–65.
- Rachmawati, D. (2016). Analisis Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 1-12.
- Sa'adah, L., & Wicoro, A. (2022). Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Jombang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan Dr. Soetomo dan Jalan Kusuma Bangsa). *Economicus*, 16(1), 91-100.
- Samahita, Randi. 2024: 960. "Strategi Negosiasi Pemerintah Kota Madiun dalam Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima." *Journal Publicuho*, Volume 7 No. 2.
- Subekti, M. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 60-67.
- Salampessy, T., et al. (2023). "Public Policy: Challenges in Developing Countries." *Journal of Political Science and Administration*, 11(3), 2–10.

- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- Sore, H., & Sabirin, A. (2017). "Stages of Public Policy Making." *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 4(1), 24–31..
- Thoriq, M. I., & Samsudin, M. (2018). Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Blauran II Kota Salatiga. *Gema Publica*, 3(2), 76-84.
- Unigal. (2018). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Dinamika Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 40–50. Universitas Galuh.
- Widyatama, S., & Wirawan, A. S. (2019). Modernizing Traditional Markets: A Case Study of Indonesia. *Journal of Business and Management*, 10(2), 123-135.

DOKUMENTASI



1. Wawancara dengan sub informasi pasar promosi & penataan perdagangan



2. Wawancara dengan kasubbag program dan keuangan



3. Wawancara dengan pedagang di Pasar Tradisional Berbasis Modern



4. Wawancara dengan pedagang di Pasar Tradisional Berbasis Modern



5. Wawancara dengan pedagang di Pasar Tradisional Berbasis Modern



6. Kondisi Pasar Terkini 2025



7. Kondisi Pasar Terkini 2025